



Analisis Penerapan Akuntansi Aset Tetap pada Koperasi di Kota Gorontalo

Aristo Kurniawan Hulopi^a, Hartati Tuli^b, Usman^c

^{a, b, c} Universitas Negeri Gorontalo, Jl. Jend. Sudirman No. 6 Kota Gorontalo, Gorontalo 96128, Indonesia

email : arizkurniawan3@gmail.com^a, hartatituli@yahoo.co.id^b, usmanpattiwi@gmail.com^c

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received 29-12-2020

Revised 24-01-2021

Accepted 30-01-2021

Kata Kunci: Aset Tetap, Akuntansi, Koperasi, SAK-ETAP

Keywords: Fixed Assets, Accounting, Cooperatives, SAK-ETAP

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan Standar Akuntansi Keuangan–Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) Bab 15 Aset Tetap pada koperasi di Kota Gorontalo. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif deskriptif. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 10 koperasi di Kota Gorontalo, penentuan sampel menggunakan *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data dengan menyebarkan angket/kuesioner. Pengujian validitas dan reliabilitas menggunakan program SPSS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 10 koperasi dengan kriteria sehat oleh Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kota Gorontalo belum sepenuhnya menerapkan SAK-ETAP Bab 15 Aset Tetap. Dari 16 pernyataan sesuai indikator SAK-ETAP Bab 15 Aset Tetap, hanya 6 pernyataan saja yang diterapkan sepenuhnya sesuai standar yang berlaku. Selebihnya 10 pernyataan tidak diterapkan sepenuhnya sesuai standar. Dikarenakan minimnya pemahaman SDM yang dimiliki oleh koperasi tersebut tentang SAK-ETAP Bab 15 Aset Tetap.

ABSTRACT

The research aims to know the implementation of Financial Accounting Standards for Entities without Public Accountability (SAK-ETAP) Chapter 15 on Fixed Assets in Cooperatives in Gorontalo City. The research applies descriptive quantitative method. There are 10 cooperatives in Gorontalo City as the sample which are taken by using purposive sampling technique. The data collection technique uses questionnaires while the validity and reliability test uses the SPSS program. The finding indicates that the 10 cooperatives classified as healthy by the Department of Manpower, Cooperatives, and SMEs of Gorontalo City have not fully implemented the SAK-ETAP Chapter 15 on Fixed Assets. There are only 6 out of the 16 statements which are fully implemented according to the indicators of SAK-ETAP Chapter 15 on Fixed Assets, and 10 statements are not fully implemented according to the applicable standards. This is due to the cooperatives' lack of understanding of human resources regarding SAK-ETAP Chapter 15 on Fixed Assets.

PENDAHULUAN

Akuntansi merupakan proses pengidentifikasi, pengukuran, pencatatan dan pelaporan informasi keuangan untuk pengambilan keputusan bagi pihak yang membutuhkannya. Hasil akhir dari sebuah akuntansi adalah laporan keuangan yang digunakan sebagai pengambilan keputusan (Suwardjono, 2012: 9–10). Sekarang banyak ilmuwan ilmu akuntansi dari berbagai aspek, misalnya Akuntansi Kas, Akuntansi Persediaan, Akuntansi Aset Tetap, Akuntansi Pajak, Akuntansi Pemerintahan, Akuntansi Syariah dan masih banyak lagi (Sodikin & Riyono, 2016: 6–9). Akuntansi memberikan informasi mengenai keuangan perusahaan atau entitas lainnya, maka dari itu akuntansi memiliki peran sangat penting dalam suatu perusahaan atau entitas lainnya karena akuntansi bagian dari sistem informasi yang menghasilkan laporan keuangan yang relevan (Horngren & Harrison, 2007: 4).

Menurut Putra (2013) aset tetap merupakan beberapa akun dalam perusahaan yang memiliki nilai yang cukup besar dan salah satu akun yang sangat penting bagi suatu entitas usaha. Nilai aktiva tetap perusahaan akan mengalami perubahan seiring dengan kondisi ekonomi di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu inflasi dan menurunnya mata uang rupiah terhadap mata uang asing.

Menurut Niswonger, *et. al.* (1999: 400) menyatakan bahwa aset tetap adalah harta berwujud (*tangible asset*) yang memiliki masa manfaat ekonomis lebih dari satu tahun dan bernilai material, dan digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan dan merupakan pengeluaran yang nilainya besar. Aset tetap berwujud pada dasarnya bisa memberikan gambaran kapitalis yang wajar, oleh karena itu dibutuhkan adanya perlakuan akuntansi yang memadai mulai dari saat perolehan sampai dengan saat pengalokasian biaya selama umur aset tetap berwujud tersebut. Perlakuan aset tetap ini bertujuan untuk memberikan kelayakan penyajian (Ariyanti & Murniati, 2019).

Aset tetap dalam tata kelola pemerintahan memiliki kontribusi yang berpengaruh besar. Apabila pengelolaan aset tetap tidak dilakukan dengan maksimal akan berdampak pada kegiatan pemerintah tidak efektif dan tidak terwujudnya tujuan pemerintah yang baik. Dalam SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) memerlukan manajemen pengelolaan dalam pemanfaatan aset yang diperoleh, sehingga prinsip efisiensi, efektivitas dan transparansi dapat terlaksana (Najoan, Tinangon, & Walandouw, 2018).

Aset tetap memiliki sifat yang rentan terhadap penurunan kapasitas sejalan dengan penggunaan atau pemanfaatannya. Oleh karena itu perusahaan ataupun koperasi harus menyajikan informasi tentang nilai aset tetap secara memadai agar dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam pengelolaan aktiva, yang meliputi perencanaan, penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pertukaran, pelepasan dan penghapusan (Somad, 2016). Penjelasan tersebut ditegaskan juga dalam penelitian (Ariyanti & Murniati, 2019). Dalam penelitiannya menjelaskan bahwa aset tetap merupakan harta berwujud perusahaan yang memiliki nilai yang cukup materil dalam laporan keuangan dan pemanfaatannya digunakan untuk kegiatan normal perusahaan serta memperoleh aset tetap juga memerlukan biaya yang cukup besar.

Pernyataan di atas juga ditegaskan dalam penelitian Najoan *et al.*, (2018) bahwa dalam laporan keuangan pemerintah aset tetap dikatakan akun dengan jumlah yang signifikan dan materil. Aset tetap juga adalah salah satu aset yang berperan dalam anggaran pemerintah karena mempunyai jumlah yang besar sehingga

pengakuan, pengukuran, pencatatan dan pelaporan informasi aset tetap menjadi sangat penting dalam laporan keuangan suatu entitas. Maka dari itu, pengelolaan aset tetap yang baik diperlukan karena aset tetap menjadi sorotan auditor BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) pada saat dilakukan pemeriksaan laporan keuangan pemerintah (Astria, 2017).

Dalam PSAK No. 16 memuat tentang Pengakuan, Pengukuran Saat Pengakuan, Pengukuran Setelah Pengakuan, Penghentian Pengakuan, Pengungkapan, Ketentuan Transisi, Tanggal Efektif dan Penarikan (Jannah & Diantimala, 2018). Akuntansi aset tetap untuk koperasi diatur dalam SAK – ETAP (Standar Akuntansi Keuangan – Entitas tanpa Akuntabilitas Publik) Bab 15 yang memuat tentang Ruang Lingkup, Pengakuan, Pengukuran pada saat Pengakuan, Pengukuran saat Pengakuan Awal, Penyusutan, Penurunan Nilai, Penghentian Pengakuan, Pengukuran setelah Pengakuan Awal, Penghentian dan Pelepasan serta Pengungkapan.

SAK-ETAP merupakan pedoman akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan bagi koperasi. Namun terdapat beberapa koperasi yang masih belum menerapkan SAK-ETAP. Berdasarkan data dari Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kota Gorontalo terdapat 308 koperasi di Kota Gorontalo, namun hanya 149 koperasi yang memiliki surat izin dari Dinas Koperasi Kota Gorontalo. Dari 149 koperasi yang memiliki surat izin dari Dinas Koperasi Kota Gorontalo, terdapat beberapa koperasi yang belum paham dan belum menerapkan SAK-ETAP.

Rumusan masalah ini adalah “Bagaimana penerapan SAK-ETAP Bab 15 pada Koperasi di Kota Gorontalo?”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan SAK-ETAP Bab 15 pada koperasi di Kota Gorontalo.

KAJIAN PUSTAKA

Teori keagenan (*agency theory*) merupakan model yang berkembang pada tahun 1970-an yang membahas mengenai hubungan kontraktual antara pemilik perusahaan dengan manajemen. Manajemen dianggap sebagai agen dan pemilik sebagai *principal*. Pemilik perusahaan (*principal*) biasanya mendeklarasikan wewenangnya kepada pihak manajemen (*agent*) perusahaan (Ustman, 2018).

Jensen & Meckling (1976) mendefinisikan hubungan keagenan merupakan suatu kontrak dimana satu atau lebih orang (*principal*) memerintah orang lain (*agent*) untuk melakukan suatu jasa atas nama *principal* serta memberi wewenang kepada *agent* untuk membuat keputusan yang terbaik bagi *principal*. Jika kedua belah pihak tersebut mempunyai tujuan yang sama untuk memaksimumkan nilai perusahaan, maka diyakini agen akan bertindak dengan cara yang sesuai dengan kepentingan *principal*.

Akuntansi merupakan bahasa bisnis yang digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi. Sejak sebuah entitas bisnis berdiri sampai dibubarkan, informasi dari proses akuntansi diperlukan oleh para pengambil keputusan (Horngren & Harrison, 2007: 4). Akuntansi menurut Sodikin & Riyono (2016) adalah suatu kegiatan jasa. Fungsinya adalah untuk menyediakan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan, tentang entitas ekonomik yang dimaksudkan agar berguna dalam pengambilan keputusan ekonomik-dalam mengambil pilihan-pilihan beralasan diantara perlbagai tindakan alternatif.

Aset tetap menurut Dewi (2014) adalah salah satu dari beberapa akun perusahaan yang memiliki nilai yang cukup besar dan juga salah satu akun yang sangat penting bagi suatu entitas usaha. Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 16 tentang aset tetap menjelaskan bahwa aset tetap yang berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif dan diperkirakan untuk digunakan selama lebih dari satu periode (IAI, 2018: 16.2).

Koperasi merupakan kumpulan dari orang-orang yang memiliki keinginan dan tujuan yang sama, yaitu memberikan manfaat bagi anggota-anggotanya demi tercapainya kesejahteraan anggota (Huvat, 2017). Menurut Standar Akuntansi Keuangan No. 27/2007 koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang pribadi atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan (Muji, *et.al.* 2018). Menurut Nuryanti (2016) koperasi sebagai wadah kegiatan ekonomi rakyat yang kuat dan berakar dimasyarakat, koperasi ialah badan yang terdiri dari sekumpulan orang yang memiliki tujuan untuk menunjang kebutuhan dan meningkatkan ekonomi, keseimbangan sosial, budaya bersamaan dengan usaha yang dimiliki dan dijalankan secara demokrasi bersama-sama.

Secara umum Standar Akuntansi Keuangan merupakan pedoman pokok penyusunan dan penyajian laporan keuangan bagi perusahaan, koperasi dan unit ekonomi lain yang sangat penting agar laporan keuangan lebih berguna, dapat dimengerti, dibandingkan dan tidak menyesatkan (Ariyanti & Murniati, 2019). Entitas koperasi dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangannya mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan-Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP), yaitu:

1. Diperuntukkan bagi entitas tanpa akuntabilitas publik signifikan
2. Pengaturannya lebih sederhana, mengatur transaksi umum yang tidak komplek
3. Perbedaan dengan PSAK No. 27/1998 tidak ada kewajiban koperasi menyusun dan menyajikan Laporan Promosi Ekonomi Anggota (LPEA) (Muji *et al.*, 2018).

Menurut IAI (2018: 15) perlakuan atas aset tetap meliputi:

1. Pengakuan

Entitas harus menerapkan kriteria pengakuan dalam paragraf 2.24 dalam menentukan pengakuan aset tetap. Oleh karena itu entitas harus mengakui biaya perolehan aset tetap sebagai aset tetap. Tanah dan bangunan adalah aset yang dapat dipisahkan dan harus dicatat secara terpisah, meskipun tanah dan bangunan diperoleh secara bersamaan.

2. Pengukuran pada saat pengakuan

Pada saat pengakuan awal, aset tetap harus diukur sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan meliputi harga beli, biaya-biaya yang diatribusikan langsung dan estimasi awal biaya pembongkaran aset.

3. Pengukuran setelah pengakuan awal

Entitas harus mengukur seluruh aset tetap setelah pengakuan awal pada biaya perolehan dikurang akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai. Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena SAK-ETAP menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah. Dalam hal ini laporan keuangan harus menjelaskan mengenai penyimpangan dari konsep biaya perolehan di

dalam penyajian aset tetap serta pengaruh dari penyimpangan tersebut terhadap gambaran keuangan entitas. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap diakui dalam ekuitas dengan nama “Surplus Revaluasi Aset Tetap”.

4. Penyusutan

Beban penyusutan harus diakui dalam laporan laba rugi, kecuali Bab lain mensyaratkan biaya tersebut merupakan biaya perolehan suatu aset. Misalnya, penyusutan aset tetap manufaktur termasuk biaya persediaan.

5. Penurunan Nilai

Entitas harus menerapkan Bab 22 Penurunan Nilai Aset untuk menentukan apakah aset tetap telah mengalami penurunan nilai dan (jika terjadi penurunan nilai) bagaimana mengakui dan mengukur kerugian penurunan nilai.

6. Penghentian pengakuan

Entitas harus menghentikan pengakuan aset tetap pada saat dilepaskan atau ketika tidak ada manfaat ekonomi masa depan yang diekspetasikan dari penggunaan atau pelepasannya. Entitas harus mengakui keuntungan atau kerugian atas penghentian pengakuan aset tetap dalam laporan laba rugi ketika aset tersebut dihentikan pengakuan. Keuntungan tersebut tidak boleh diklasifikasikan sebagai pendapatan.

METODE PENELITIAN

a. Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang bertujuan untuk menganalisis, mendeskripsikan atau menggambarkan data dalam bentuk tabel, perhitungan presentase dan perhitungan lainnya yang telah terkumpul sebagaimana adanya (Sugiono, 2014: 147). Sedangkan bentuk penelitian yang digunakan adalah bentuk penelitian kuantitatif, yaitu penelitian yang datanya diperoleh dan dianalisis dalam bentuk angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut dan penampilan dari hasilnya.

b. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Jenis data yang dilakukan dalam penelitian yaitu data primer. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan Data Keragaan Koperasi Yang Aktif di Kota Gorontalo tahun 2019. Adapun data yang menjadi sumber data dalam penelitian ini data primer dan data sekunder. Data primer tersebut berupa Data Keragaan Koperasi Yang Aktif di Kota Gorontalo tahun 2019 yang diperoleh dari Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kota Gorontalo. Serta data sekunder tersebut berupa data laporan keuangan koperasi.

c. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Setelah peneliti selesai melakukan penelitian dengan mengumpulkan data-data dari responden, hal selanjutnya yang dilakukan adalah analisis data. Data yang peneliti peroleh adalah data mentah yang berisi jawaban responden mengenai permasalahan yang diteliti. salah satu tujuan dari analisis data adalah menyederhanakan seluruh data dan kemudian disajikan dalam susunan yang sistematis, setelah itu menafsirkan atau memaknai data yang didapat (Munggaran, 2012).

Data yang diperoleh oleh peneliti adalah data yang bersifat kuantitatif dengan

model pengukuran skala interval sehingga data tersebut perlu diolah untuk proses penarikan kesimpulan. Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah teknik hitung analisis deskriptif untuk mendeskripsikan variabel penelitian dalam pengukuran.

Adapun teknik statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah persentase. Sebelum menggunakan persentase, hal pertama yang dilakukan peneliti adalah menghitung skor tertinggi atau kriteria yang akan diperoleh dari jawaban responden. Skor (kriteria) ini menjadi acuan untuk interpretasi data (Rafiq, 2018). Adapun rumus untuk mencari skor (kriteria) adalah sebagai berikut:

Setelah diperoleh nilai x (kriteria) maka selanjutnya dicari total keseluruhan masing-masing butir pertanyaan. Nilai total setiap pertanyaan dapat dicari dengan menggunakan rumus:

$$X = \text{Skala Tertinggi Kuesioner} \times \text{Jumlah Responden}$$

$$\text{Total skor setiap pertanyaan} = \sum (T \times P_n)$$

Keterangan:

T = Nilai skala yang dipilih responden

P_n = Jumlah responden yang memilih jawaban tersebut

Atau untuk lebih mudahnya peneliti menggunakan rumus SUM pada aplikasi Microsoft Excel untuk menghitung total skor setiap butir pernyataan. Selanjutnya peneliti menghitung persentase untuk setiap butir pernyataan. Penghitungan persentase dari total jawab keseluruhan setiap butir pernyataan dilakukan dengan cara membagi total skor setiap butir pernyataan dengan kriteria (skor tertinggi yang mungkin didapatkan). Rumusnya adalah (Rafiq, 2018):

$$P = \frac{\text{Total Skor}}{X} \times 100 \%$$

Keterangan:

P = Persentase

X = Kriteria (Skor tertinggi)

100% = Konstanta

Kemudian hasil pengujian deskriptif dijabarkan dalam bentuk kategori interval persentase sebagai berikut:

Tabel 1. Kategori Interval Presentase

No	Kategori	Presentase
1	Menerapkan sepenuhnya	81% - 100%
2	Sebagian besar menerapkan	61% – 80%
3	Cukup menerapkan	41% - 60%
4	Sebagian kecil menerapkan	21% - 40%
5	Tidak menerapkan sama sekali	0% - 20%

Sumber: Data diolah, 2020

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen

Dari hasil uji validitas dapat dilihat bahwa semua butir pernyataan memiliki nilai r_{hitung} lebih besar dari r_{tabel} dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05. Sementara

dari hasil uji *Cronbach Alpha*, nilai yang didapatkan adalah 0,965 atau sekitar 96%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa item pernyataan dalam instrumen/kuesioner yang digunakan valid dan reliabel.

2. Penerapan Akuntansi Aset Tetap berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan-Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP)

Untuk mengetahui penerapan Standar Akuntansi Keuangan-Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) Bab 15 Aset Tetap, dilakukan penyebaran kuesioner atau angket dengan menggunakan skala interval. Pernyataan untuk penerapan SAK-ETAP terdiri dari 8 indikator yaitu Ruang Lingkup, Pengakuan, Biaya Perolehan, Pengukuran, Penyusutan, Penurunan Nilai, Penghentian Pengakuan dan Pengungkapan yang tersebar dalam 16 butir pernyataan. Adapun hasil pengolahannya adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Hasil perhitungan Penerapan Akuntansi Aset Tetap berdasarkan SAK-ETAP

No Item	Presentase	Jawaban Responden
1	88,57%	Menerapkan Sepenuhnya
2	91,42%	Menerapkan Sepenuhnya
3	58,57%	Cukup Menerapkan
4	84,28%	Menerapkan Sepenuhnya
5	49,28%	Cukup Menerapkan
6	51,42%	Cukup Menerapkan
7	80,71%	Sebagian Besar Menerapkan
8	42,85%	Cukup Menerapkan
9	90,71%	Menerapkan Sepenuhnya
10	80,71%	Sebagian Besar Menerapkan
11	75%	Sebagian Besar Menerapkan
12	60,71%	Cukup Menerapkan
13	65,71%	Sebagian Besar Menerapkan
14	85,71%	Menerapkan Sepenuhnya
15	82,14%	Menerapkan Sepenuhnya
16	75%	Sebagian Besar Menerapkan

Sumber: Data diolah, 2020.

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa dari beberapa pernyataan yang diajukan untuk melihat seberapa besar penerapan SAK-ETAP Bab 15 Aset Tetap pada koperasi di Kota Gorontalo, hanya 6 pernyataan yang memiliki nilai diatas 81% sehingga jawaban responden tersebut dapat dimasukan kedalam suatu kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya yakni: Menerapkan Sepenuhnya, Sebagian Besar Menerapkan dan Cukup Menerapkan. Hal ini sebanding lurus dengan kurangnya pemahaman oleh SDM yang dimiliki oleh koperasi tentang SAK-ETAP Bab 15 Aset Tetap.

Hasil dari pernyataan 4, 5, dan 6 tentang biaya perolehan aset tetap termasuk dalam kriteria menerapkan sepenuhnya untuk pernyataan 4 dan kriteria cukup menerapkan untuk pernyataan 5 dan 6. Koperasi mencatat bahwa biaya angkut aset tetap sebagai penambahan biaya perolehan dari aset tetap tersebut. Namun untuk diskon/potongan harga pembelian tidak dicatat sebagai pengurangan dari biaya perolehan dan apabila aset tetap diperoleh secara kredit, total pembayaran keseluruhan kredit (ditambah dengan bunga) tidak dicatat sebagai penambahan biaya perolehan aset tetap.

Hasil dari pernyataan 7 dan 8 tentang pengukuran aset tetap termasuk dalam kriteria sebagian besar menerapkan untuk pernyataan 7 dan kriteria cukup

menerapkan untuk pernyataan 8. Sebagian besar koperasi mengukur biaya-biaya yang diakui sebagai beban untuk dicatat dalam laporan laba/rugi. Serta untuk revaluasi (penilaian kembali) aset tetap hampir keseluruhan koperasi menerapkannya, berdasarkan SAK-ETAP bahwa revaluasi aset tetap tidak diperkenankan.

Hasil dari pernyataan 9, 10, 11, dan 12 tentang penyusutan termasuk dalam kriteria menerapkan sepenuhnya untuk pernyataan 9. Pernyataan 10 dan 11 termasuk dalam kriteria sebagian besar menerapkan serta pernyataan 12 termasuk dalam cukup menerapkan. Koperasi sepenuhnya mencatat beban penyusutan dalam laporan laba/rugi. Sebagian besar koperasi juga mengalokasikan jumlah aset yang disusut secara sistematis pada saat aset tetap tersedia digunakan namun untuk memilih metode penyusutan, koperasi masih enggan memilih metode penyusutan berdasarkan SAK-ETAP.

Hasil dari pernyataan 13 tentang penurunan nilai aset tetap termasuk dalam kriteria sebagian besar menerapkan. Koperasi akan menurunkan nilai aset tetap apabila terjadi kerusakan dan keusangan. Hal tersebut yang bisa menurunkan nilai aset tetap dalam laporan neraca koperasi.

Hasil dari pernyataan 14 dan 15 tentang penghentian pengakuan termasuk dalam kriteria menerapkan sepenuhnya. Koperasi akan menghentikan pengakuan aset tetap dalam laporan neraca koperasi apabila aset tetap tersebut tidak ada manfaat ekonomi dimasa depan yang diekspetasikan. Serta koperasi akan mengakui keuntungan dan kerugian atas penghentian aset tetap tersebut dalam laporan laba/rugi koperasi.

Hasil dari pernyataan 16 tentang pengungkapan pencatatan aset tetap termasuk dalam kriteria sebagian besar menerapkan. Sebagian koperasi telah menerapkan hal tersebut. Mulai dari pengungkapan kelompok aset tetap (metode penyusutan, dasar pengakuan yang digunakan untuk menentukan jumlah tercatat bruto, umur manfaat, penambahan, pelepasan, serta kerugian dan keuntungan dari pengertian pengakuan aset tetap).

Dampak akibat kurangnya pemahaman tersebut akan menimbulkan kesalahan-kesalahan dalam penerapan akuntansi aset tetap. Kesalahan yang kecil untuk aset tetap berdampak besar bagi pengelolaan koperasi, karena nilai aset tetap koperasi sangat material. Maka dari itu dibutuhkan perlakuan akuntansi aset tetap yang memadai.

Penerapan SAK-ETAP Bab 15 Aset Tetap pada koperasi di Kota Gorontalo bertujuan agar untuk keseimbangan informasi antara prinsipal dan agen. Tanpa adanya penerapan ini, akan membuat ketidakseimbangan informasi antara kedua belah pihak. Maka dari itu diperlukan SAK-ETAP untuk menyelaraskan informasi prinsipal dan agen.

SIMPULAN, SARAN DAN KETERBATASAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 10 koperasi dengan kriteria sehat oleh Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kota Gorontalo belum sepenuhnya menerapkan Standar Akuntansi Keuangan-Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) Bab 15 Aset Tetap. Dari 16 pernyataan sesuai indikator SAK-ETAP Bab 15 Aset Tetap, hanya 6 pernyataan saja

yang diterapkan sepenuhnya oleh 10 koperasi di Kota Gorontalo. Terdiri dari pernyataan 1, 2, 9, 14 dan 15. Selebihnya 5 pernyataan lain hanya sebagian besar yang menerapkan. Terdiri dari pernyataan 7, 10, 11, 13 dan 15. Serta 5 pernyataan lainnya hanya cukup diterapkan oleh koperasi yang terdiri dari 3, 5, 6, 8 dan 12. Dikarenakan minimnya pemahaman SDM yang dimiliki oleh koperasi tersebut terhadap SAK-ETAP Bab 15 Aset Tetap yang mengakibatkan belum sepenuhnya penerapan standar tersebut pada 10 koperasi kriteria sehat oleh Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kota Gorontalo.

B. Saran

Berdasarkan simpulan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi peneliti selanjutnya disarankan agar dapat menambah fokus penelitian (variabel) yang tidak terdapat pada penelitian ini, yang terkait dengan penerapan Standar Akuntansi Keuangan-Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP).
2. Peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah objek penelitian misalnya 10 koperasi atau membandingkan antar Kota-Kabupaten yang ada di Provinsi Gorontalo, bukan hanya berfokus pada 1 objek penelitian yang berskala kecil. serta dapat menggunakan metode penelitian berbeda yang tentu lebih bisa menjawab serta memperoleh informasi lebih dalam dari responden agar data yang diperoleh lebih mencerminkan keadaan yang sebenarnya.

C. Keterbatasan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menyadari ada beberapa keterbatasan yang mungkin mempengaruhi hasil penelitian. Adapun keterbatasan-keterbatasan tersebut antara lain:

1. Variabel dalam penelitian ini hanya terbatas pada Standar Akuntansi Keuangan-Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) Bab 15 Aset Tetap. sehingga hasil penelitian ini tidak mampu menggambarkan penerapan SAK-ETAP secara keseluruhan pada 10 Koperasi kriteria sehat oleh Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kota Gorontalo.
2. Penelitian ini hanya mengambil sampel yang sedikit yaitu, sehingga hasil penelitian tidak mampu mewakili seluruh koperasi yang ada di Kota Gorontalo.
3. Populasi dalam penelitian ini hanya lingkup kecil yaitu hanya di Kota Gorontalo.
4. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner/survei tertutup yang tentunya memiliki kelemahan yaitu kadang responden kurang serius dalam mengisi kuesioner.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariyanti, R., & Murniati, S. (2019). *Analisis perlakuan akuntansi aset tetap berdasarkan sak-etap no. 15 pada koperasi pt. pisma putra pekalongan*. 16, 49–57.
- Astria, I. (2017). Analisis perlakuan akuntansi aset tetap pada rsud dr. soeratno gemolong sragen. *Skripsi institut agama islam negeri surakarta*, 1–88.
- Dewi, P. N. (2014). *Implementasi revaluasi aset tetap berdasarkan peraturan menteri keuangan no. 79 tahun 2008 pada perusahaan di indonesia*. 1–20.

- horngren, C. T dan Harrison, W. T. 2007. *Akuntansi edisi ketujuh jilid satu*. Jakrta: penerbit erlangga.
- Huvat, Y. J. (2017). *Analisis penerapan standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntansi publik (sak-etap) pada koperasi cu (credit union) daya lestari di samarinda*.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. 2018. *Psak no. 16 aset tetap*. Jakarta
- Ikatan Akuntansi Indonesia. 2018. *Sak etap bab 15 aset tetap*. Jakarta
- Jannah, R., & Diantimala, Y. (2018). Faktor-faktor yang mempengaruhi perusahaan melakukan revaluasi aset tetap sesuai dengan psak 16 (2015) di indoneisa. *Jurnal ilmiah mahasiswa ekonomi akuntansi (jimeka)*, 3(3), 515–526.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm : managerial behavior, agency. *Journal of financial economics*, 3(4), 305–360.
- Muji, A., Sekarwati, S., & Mazidah, N. (2018). Analisis penerapan standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik (sak etap) pada laporan keuangan koperasi karyawan industri kemasan semen gresik (iksg). *INOVASI*, 14(1), 20–28.
- Munggaran, R. D. (2012). *Pemanfaatan open source software pendidikan oleh mahasiswa dalam rangka implementasi undang-undang no. 19 tahun 2002 tentang hak cipta*. (19), 73. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2486.2005.00955.x>
- Najoan, G. N. R., Tinangon, J. J., & Walandouw, S. K. (2018). *Evaluasi pengakuan, pengukuran, pencatatan dan pelaporan aktiva tetap menurut pp no. 71 tahun 2010 pada dinas koperasi dan umkm provinsi sulawesi utara*. 13(2), 200–209.
- Niswonger, C. Rollin. Warren, Carl S. Reeve, James M., dan Fees, Philip E. 1999. *Prinsip-prinsip akuntansi*. Jakarta: erlangga
- Nuryanti, Y. (2016). *Analisis penerapan akuntansi perkoperasian pada primkopti harum kecamatan waleri kabupaten kendal berdasarkan sak etap (studi kasus pada primkopti harum kec. waleri kab. kendal)*. 1–7.
- Putra, T. (2013). Analisis penerapan akuntansi aset tetap pada cv. kombos manado. *Jurnal riset ekonomi, manajemen, bisnis dan akuntansi*, 1(3), 190–198.
- Rafiqah, Falah. (2018). Analisis tingkat pemahaman dan tingkat kesiapan umkm dalam implementasi sak emkm dalam pelaporan keuangan di kota padang. *Skripsi jurusan akuntansi universitas andalas*.
- Sodikin, Slamet Sugiri dan Riyono, Bogat Agus. 2016. *Akuntansi pengantar 1 edisi kesembilan*. Yogyakarta: penerbit upp stim ykpn.
- Somad, I. (2016). Analisis penerapan kebijakan akuntansi aktiva tetap pada koperasi prima polipera. *Karya tulis ilmiah universitas pasir pengaraian rokan hulu*, 1–10.
- Sugiono. 2014. *Metode penelitian manajemen*. Yogyakarta: alfabetia.
- Suwardjono. 2012. *Teori akuntansi perekayasaan pelaporan keuangan edisi ketiga*. Yogyakarta: penerbit bpfe.
- Ustman, M. A. (2018). Analisis faktor-faktor ketepatan waktu penyampaian laporan

keuangan perusahaan sektor barang konsumsi. *Skripsi Universitas Islam Indonesia*, 1–111.